

Judul : Perbaiki Data Agar Subsidi Tepat Sasaran: Subsidi Elpiji 3 kg
Tanggal : Senin, 12 Oktober 2020
Surat Kabar : Kontan
Halaman : 14

■ **SUBSIDI ELPIJI 3 KG**

Perbaiki Data Agar Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA. Sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap efektivitas pelaksanaan subsidi elpiji 3 kg membuat pemerintah harus segera berbenah. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima subsidi elpiji tabung 3 kg agar lebih tepat sasaran.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga menyarankan pemerintah segera memperbaiki manajemen pengelolaan subsidi gas elpiji 3 kg. Menurut Ketua BPKN Rizal E Halim, pemerintah dan Pertamina harus melakukan beberapa hal agar subsidi tepat sasaran.

Pertama, memperbaiki database penerima subsidi. *Kedua*, memperbaiki manajemen operasional dan pengawasan dari hulu hingga hilir pelaksanaan distribusi elpiji. "Yang dianggap tidak tepat sasaran bukan kebijakannya, tapi manajemen dan pengawasan," kata Rizal kepada KONTAN, Minggu (11/10).

Rizal mencontohkan, hingga saat ini gas melon dijual bebas dan bisa dibeli secara bebas baik kelompok menengah atas maupun restoran. Ini yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menjelaskan, terdapat tiga permasalahan pelaksana-

an program subsidi gas elpiji 3 kg. *Pertama*, upaya pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi elpiji tidak efektif, karena anggaran subsidi melebihi subsidi minyak tanah.

Kedua, perencanaan, operasional, pengendalian, dan pengawasan penyaluran elpiji 3 kg bermasalah. *Ketiga*, mekanisme pengendalian melalui distribusi tertutup terbukti gagal. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan pemerintah dan PT Pertamina (Perseero) agar *pertama* mengevaluasi Perpres Nomor 38/2019 tentang Perluasan Penggunaan LPG Bersubsidi.

Kedua, pemerintah musti mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung (*targeted subsidy*) dalam bentuk *cash transfer* dengan utilisasi Basis Data Terpadu (BDT) atau DTKS sesuai NIK sebagai target penerima subsidi energi.

Meski demikian Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Suparno berharap masyarakat tetap bisa mendapatkan elpiji 3 kg dengan harga murah. Eddy sepakat agar pemerintah dan Pertamina segera mengevaluasi kebijakan subsidi elpiji 3 kg ini agar lebih tepat sasaran dan anggaran subsidi tidak membengkak.

Vendy Y. Susanto, Filemon A.